

# POHON KINERJA 2024-2026

Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 hal 7, 20, dan 25 serta Permenpan RB Nomor 14 tahun 2014 hal 15-17)
Fenomena / Penyebab	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang Tahun 2020 berada di peringkat 36 dari 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan nilai 56,66 dengan predikat CC (Perbub Kab Lumajang No. 55 Tahun 2020 hal.8)

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 halaman 12 dan 33 poin b bahwa : Pelayanan Publik merupakan salah satu program Reformasi Birokrasi sebagai pengungkit yang dapat meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi. Semakin tinggi nilai IKM maka kualitas pelayanan publik semakin Prima sehingga Reformasi Birokrasi dapat tercapai

Yudi Rusfiana, Cahya Supriatna judul buku Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan (2021 : hal 96 - 105)

berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 halaman 33-34 Fenomena dapat terjadi karena Target Kualitas pelayanan publik belum meningkat sehingga capaian Indeks Reformasi Birokrasi masih rendah

Ahmad Fatkul Fikri, Titisari Haruming Tyas, Jurnal Ilmu Pemerintahan "KAJIAN KEPUASAN MASYARAKAT PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BREBES" Widya Praja Volume 47, No. 2, November 2021: 239-248 Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	
Indikator	Indeks Pelayanan Publik (PermenPAN RB No.17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Fenomena / Penyebab	Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada masyarakat dibuktikan dengan hasil nilai UP3 Kecamatan Pronojiwo Tahun 2022 sebesar 68,50 (B-) sudah memenuhi Target Renstra Tahun 2024 -2026 namun capai pada tahun 2023 belum memenuhi target yaitu senilai 71 (B) namun realisasi senilai 67,88 (B-). pemenuhan akan dimaksimalkan pada tahun berikutnya (PermenPAN RB No.17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 huruf c bahwa ASN sebagai profesi yang berlandaskan prinsip mempunyai komitmen, integrasi moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 hal 36)

Setyo Nugroho, Andy Fefta Wijaya, Moh. Said (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang) Jurnal "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang)" Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.5, Hal.-1010-1015-

dikarenakan fenomena sering terjadi maka berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016 Pasal 2 -8 menyebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan Desa harus akuntabel dan tertib pencatatan serta pasal 12 ayat 3 terkait pelimpahan kewenangan kepada camat terkait fungsi pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan.

fenomena yang terjadi adalah tidak sesuai kualitas pendidikan dengan tupoksi sesuai Peraturan Bupati Lumajang no 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 2

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan UU no.6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 bahwa : asas penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dan partisipatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik

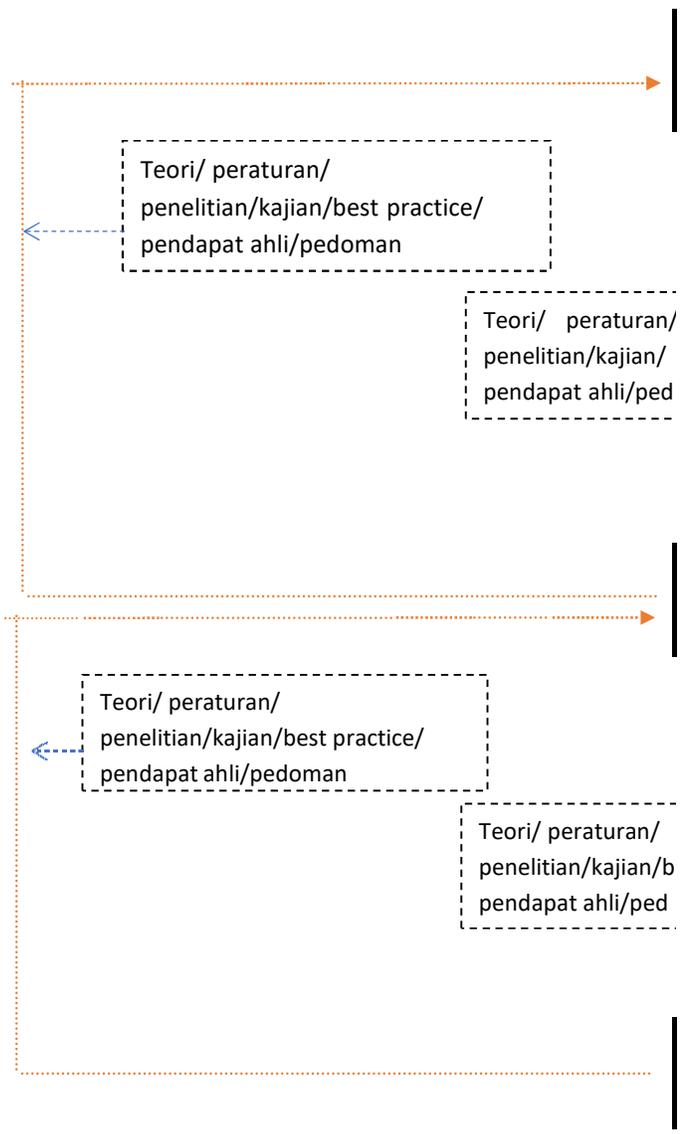
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	
Indikator	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 7 - 10)
Fenomena / Penyebab	Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti dikarenakan belum optimalnya kualitas dan kuanlitas SDM ASN karena hanya 40% dr pejabat yang telah melaksanakan diklat PIM, serta hanya 60% SDM yang memiliki pendidikan S1 dan rata-rata antara pendidikan dengan tupoksi yang di emban tdk sesuai (Data Pegawai)

Cross cutting dpt dijelaskan pada Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 hal 36 terkait Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0.dengan Permendagri No. 47 Tahun pasal 12 ayat 3 terkait pelimpahan kewenangan kepada camat terkait fungsi pembinaan dan pengawasan yg perlu ditingkatkan. Semakin tinggi kualitas SDM maka kualitas penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa semakin meningkat

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	
Indikator	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 8 point g dan PP 43 th 2014 pasal 154 serta PMDN nomor 73 tahun 2020 hal. 22
Fenomena / Penyebab	Kualitas penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa masih belum optimal karena hasil Berita Acara verifikasi binwas desa dari ke 6 Desa semua memiliki catatan dalam penyusunan administrasi pemerintah desa (Berita Acara Tim Binwas Kecamatan Pronojiwo)

  
**MARHOTO WOBOWO, S.STP**  
 NIP. 19830621 200112 1 001







..... (ultimate outcome)	
Indikator	
Fenomena / Penyebab	

MAKA

best practice/  
oman



JIKA

..... (intermediate outcome)	
Indikator	
Fenomena / Penyebab	

MAKA

est practice/  
oman



JIKA

.....(immediate outcome)	
Indikator	
Fenomena / Penyebab	





---



---

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 poin b bahwa : Pelayanan Publik merupakan salah satu program Reformasi Birokrasi yang dapat meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi. Semakin tinggi nilai IKM maka publik semakin Prima sehingga Reformasi Birokrasi dapat tercapai

Yudi Rusfiana, Cahya Supriatna judul buku Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Pe : hal 96 - 105)

Keterkaitan Hubungan variabel/ indikator berdasarkan UU no.5 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 huruf c bahwa ASN sebagai berlandaskan prinsip mempunyai komitmen, integrasi moral, dan jawab pada pelayanan publik dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 36)

Setyo Nugroho, Andy Fefta Wijaya, Moh. Said (Jurusan Administ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang) Jurn "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA D

fenomena yang terjadi adalah tidak sesuainya kualifikasi pendidikan dengan tupoksi sesuai Peraturan Bupati Lumajang no 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 2

### Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan

Indikator	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang di (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 te Daerah pasal 10 hal 7 - 10)
Fenomena / Penyebab	Kurang Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Kec ditindaklanjuti dikarenakan belum optimalnya ku kuanlitas SDM ASN karena hanya 40% dr pejabat melaksanakan diklat PIM, serta hanya 60% SDM pendidikan S1 dan rata-rata antara pendidikan d yang di emban tdk sesuai (Data Pegawai)

Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi (Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 hal 7, 20, dan 25 serta Permenpan RB Nomor 14 tahun 2014 hal 15-17)
Fenomena / Penyebab	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang Tahun 2020 berada di peringkat 36 dari 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan nilai 56,66 dengan predikat CC (Perbub Kab Lumajang No. 55 Tahun 2020 hal.8)

halaman 12 dan 33 sebagai pengungkit kualitas pelayanan

erkembangan (2021

Maka

JIKA

Meningkatnya kepuasan masyarakat	
Indikator	IKM Pelayanan Kecamatan Pronojiwo (Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Fenomena / Penyebab	Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada masyarakat dibuktikan dengan hasil dokumen IKM tahun 2021 sebesar 85,5% belum memenuhi Target P-Renstra Tahun 2018 -2023 sebesar 86% sehingga perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya (PERMENPAN RB Nomor n 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Hal. 19)

tahun 2014 ai profesi yang an tanggung un 2020 hal

trasi Publik, al ALAM UPAYA

Maka

JIKA

mberdayaan  
P), Vol. 1,

Keterkaitan Hubungan var  
desa pasal 24 bahwa : asa  
kepastian hukum, tertib p  
keterbukaan, proporsiona  
dan partisipatif dalam me

Maka

tan

tindakanjuti  
ntang Perangkat

amatan yang  
alitas dan  
yang telah  
yang memiliki  
engan tupoksi

Cross cutting dpt dijelaskan pada Permenpan RB  
Nomor 25 Tahun 2020 hal 36 terkait Reformasi  
Birokrasi perlu mendorong setiap ASN agar memiliki  
keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat  
membantu birokrasi menghadapi era digital dan  
industri 4.0.dengan Permendagri No. 47 Tahun pasal  
12 ayat 3 terkait pelimpahan kewenangan kepada  
camat terkait fungsi pembinaan dan pengawasan yg  
perlu ditingkatkan. Semakin tinggi kualitas SDM maka  
kualitas penyusunan dokumen administrasi  
pemerintah desa semakin meningkat



berdasarkan permenpan RB 26 tahun 2020 halaman 33-34 Fenomena dapat terjadi karena Target Kualitas pelayanan publik belum meningkat sehingga capaian Indeks Reformasi Birokrasi masih rendah

Ahmad Fatkul Fikri, Titisari Haruming Tyas, Jurnal Ilmu Pemerintahan "KAJIAN KEPUASAN MASYARAKAT PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BREBES" Widya Praja Volume 47, No. 2, November 2021: 239-248 Universitas Pertahanan Republik Indonesia

dikarenakan fenomena sering terjadi maka berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016 Pasal 2 -8 menyebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan Desa harus akuntabel dan tertib pencatatan serta pasal 12 ayat 3 terkait pelimpahan kewenangan kepada camat terkait fungsi pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan.

Label/ indikator berdasarkan UU no.6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, litas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi meningkatkan kualitas pelayanan publik



Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	
Indikator	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah pasal 10 hal 8 point g dan PP 43 th 2014 pasal 154 serta PMDN nomor 73 tahun 2020 hal. 22
Fenomena / Penyebab	Kualitas penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa masih belum optimal karena hasil Berita Acara verifikasi binwas desa dari ke 6 Desa semua memiliki catatan dalam penyusunan administrasi pemerintah desa (Berita Acara Tim Binwas Kecamatan Pronojiwo)





hal  
pembang  
unan  
SDM,  
Reformasi  
Birokrasi  
perlu  
mendoro  
ng setiap  
ASN agar  
memiliki  
keterampi  
lan dan  
kompeten  
si spesifik  
yang  
dapat  
membant  
u  
birokrasi  
menghad  
api era  
digital  
dan  
industri  
4.0.

25

14

Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur Penataan sistemmanajemen SDMaparatur be

rtujuan untukmeningkatkanprofesionalismeSDM aparaturpadamasing-masinginstansipemerintah,yangdidukung

oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jami

nan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya ketaatan

rhadappengelolaanSDMaparaturpadamasing-masinginstansi pemerintah;